

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kompetensi SDM**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia**

Menurut Sulistyowati (2021) SDM merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah instansi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Wibowo (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir, serta perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

###### **2.1.1.2 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Yendrawati (2013) menyatakan bahwa pengertian kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Pengertian kompetensi Menurut Wibowo (2013) adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugasnya dalam organisasi. Sedangkan Sudiarti (2020) mengungkapkan jika Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jadi secara umum, kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya.

### **2.1.1.3 Macam-macam Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Michael Zwell sebagaimana dikutip oleh Wibowo (2013) memberikan lima macam kompetensi, yang terdiri dari:

- a) *Task achievement* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan *Task achievement* ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

b) *Relationship* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan *Relationship* meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

c) *Personal attribute* merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. *Personal attribute* merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

d) *Managerial* merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

e) *Leadership* merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan *leadership* meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen

perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun focus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

#### **2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SDM**

Michael Zwell sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo (2013) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berfikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Setiap orang harus berpikiran positif baik terhadap dirinya maupun orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikiran kedepan.
2. Keterampilan. Keterampilan merupakan peran penting di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan

dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman. Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasi untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

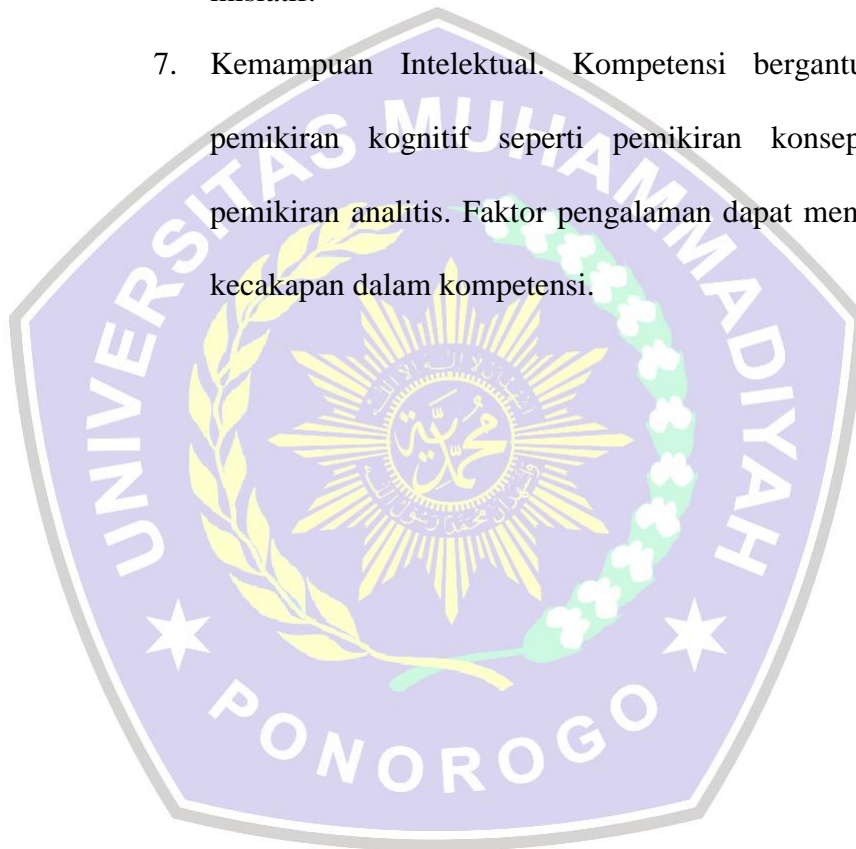
4. Karakteristik Kepribadian. Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya. Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian seorang karyawan dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dalam membangun hubungan dalam tim.

5. Motivasi. Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memeberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan

pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat berpengaruh positif terhadap motivasi bawahan.

6. Isu Emosional. Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan Intelektual. Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.



### **2.1.1.5 Indikator Kompetensi SDM**

Menurut Wiguna (2017) indikator kompetensi sumber daya manusia meliputi:

1. Pengembangan diri. Kemampuan untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, terutama perilaku dan kemampuan mengembangkan diri.
2. Profesional. Kemampuan dalam memahami setiap pekerjaan yang diberikan dan siap melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki.
3. Penguasaan teknologi. Kemampuan dalam menguasai teknologi dalam proses pekerjaan.
4. Jenjang pendidikan. Kemampuan untuk memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang sesuai dalam melaksanakan bidang pekerjaan.
5. Keahlian. Kemampuan untuk bertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

## **2.1.2 Pelatihan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pelatihan**

Pelatihan merupakan suatu proses mengajarkan pengetahuan dan juga keahlian tertentu serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan standar (Mangkuprawira, 2011). Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian proses

seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional dibidangnya. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan seorang pegawai melaksanakan pekerjaan yang ditugaskannya sesuai dengan standar. Sedangkan Rivai dan Sagala (2011) menyatakan bahwa pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, dimana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu usaha atau proses yang dapat membantu peserta pelatihan guna untuk meningkatkan atau memperoleh keterampilan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan melalui pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Semakin baik pelatihannya maka semakin baik pula peningkatannya.



### 2.1.2.2 Tujuan Pelatihan

Menurut Siregar (2020) tujuan latihan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan baik swasta maupun pemerintah adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
2. Menanamkan pengetahuan yang sama mengenai suatu tugas dalam kaitannya dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi perusahaan.
3. Mengusahakan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan situasi dan kondisi teknologi yang terjadi akibat berhasilnya pembangunan.
4. Menumbuhkan minat dan perhatian pegawai terhadap bidang tugas masing-masing.
5. Memupuk keberanian berpikir kreatif dan berpartisipasi dalam diskusi.
6. Memupuk hubungan kerja sama antar pegawai secara efisien serta menanamkan jiwa kesatuan.
7. Mengubah sikap dan tingkah laku mental pegawai ke arah kerja yang jujur dan efektif
8. Menumbuhkan rasa turut memiliki dan tanggung jawab pegawai.
9. Mengurangi frekuensi pengawasan.

### 2.1.2.3 Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Terdapat beberapa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan penggunaan sistem keuangan desa menurut Siregar (2020) yaitu:

1. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang terdiri dari: musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembentukan tim penyusunan RKPDDes, penyusunan rancangan RKPDDes, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan rancangan Perdes tentang RKPDDes, Pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang RKPDDes serta terakhir Penetapan peraturan desa tentang RKPDDes.
2. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan dengan tahapan berikut: penyusunan rancangan APBDes, penyampaian rancangan Perdes tentang APBDes, pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang APBDes dan terakhir Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes.

### 2.1.2.4 Indikator Pelatihan

Menurut Wiguna (2017) indikator pelatihan meliputi:

1. Program pelatihan mengajarkan pemakaian sistem yang benar  
Pemerintah pusat dan pemerintah desa telah mengadakan sebuah pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan SISKEUDES dengan baik dan benar.

2. Program pelatihan mengajarkan sistem komunikasi

Program pelatihan dan pendidikan mengenai SISKEUDES dapat memberikan pemahaman mengenai bahasa, prosedur, dan data sistem secara efektif.

3. Keuntungan dari program pelatihan

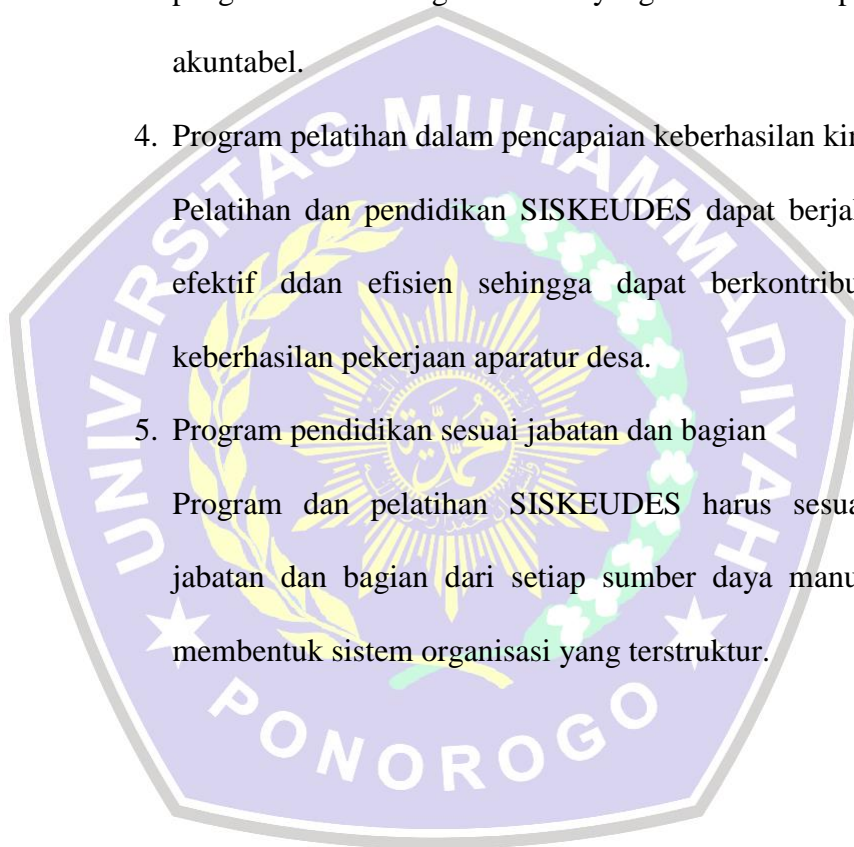
Program pelatihan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

4. Program pelatihan dalam pencapaian keberhasilan kinerja

Pelatihan dan pendidikan SISKEUDES dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat berkontribusi dalam keberhasilan pekerjaan aparatur desa.

5. Program pendidikan sesuai jabatan dan bagian

Program dan pelatihan SISKEUDES harus sesuai dengan jabatan dan bagian dari setiap sumber daya manusia untuk membentuk sistem organisasi yang terstruktur.



### **2.1.3 Manajemen Kontrol**

#### **2.1.3.1 Pengertian Manajemen Kontrol**

H.B Siswanto (2016) menyatakan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran perusahaan. Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa pengertian sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang akan dicapai oleh organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan.

Dari pengertian diatas maka pengendalian manajemen merupakan serangkaian tindakan yang mengarahkan suatu operasi perusahaan agar strategi dan kebijakan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

#### **2.1.3.2 Tujuan Manajemen Kontrol**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tujuan manajemen kontrol mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Laporan dapat dikatakan andal jika informasi yang diberikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak mengandung arti yang menyesatkan dan kesalahan yang material, semua fakta dinyatakan dengan jelas dan jujur serta informasi yang diberikan diverifikasi.

3. Pengamanan Aset

Kepastian terhadap keamanan sumber-sumber daya dan aset dapat terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan aset tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrative.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

### **2.1.3.3 Indikator Manajemen Kontrol**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 indikator manajemen kontrol terdiri dari:

### 1. Lingkungan Pengendalian

Kepala instansi pemerintah dan semua pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan di seluruh organisasi untuk menghasilkan perilaku positif dalam mendukung pengendalian internal dan manajemen internal yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penegakan integritas dan nilai etika, serta komitmen terhadap kompetensi.

### 2. Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi organisasi baik dari eksternal maupun internal, meliputi kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa arahan dari Pimpinan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu bentuk kegiatan pengendalian adalah penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

#### 4. Informasi Dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Instansi Pemerintah dan pihak lain yang telah ditetapkan. Informasi disajikan dalam bentuk, metode dan sarana tertentu, serta tepat waktu, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan pengendalian dan melaksanakan tanggungjawabnya.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan adalah bentuk penilaian kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan dapat segera menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi hasil audit lainnya.

### **2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**

#### **2.1.4.1 Keuangan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) Tentang Desa menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Sunarti dkk, 2018).

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan

asas-asas akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBN Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusawaratan Desa. Sesuai dengan permusyawaratan APBDes, Kepala Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan menggunakan Peraturan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan dari pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan kekuasaannya kepada



perangkat desa. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **2.1.4.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **(APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Juliana (2017) adalah “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:85) mengemukakan bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan desa dalam periode satu tahun yang di dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APBDes juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari aparatur desa kepada masyarakat karena di dalam APBDes memuat informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa tersebut dibiayai oleh dana desa.

### 2.1.4.3 Macam-Macam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Nurcholis (2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:

a. Pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- 3) Bagian dari reputasi kabupaten/kota
- 4) Alokasi dana desa (ADD)
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan pihak ke tiga.
- 8) Belanja desa

b. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- 1) Belanja langsung yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja modal

2) Belanja tidak langsung terdiri atas

a. Belanja pegawai/ penghasilan tetap

b. Belanja subsidi

c. Belanja hibah (pembatasan hibah)

d. Belanja bantuan social

e. Belanja bantuan keuangan

f. Belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya

b) Pencairan dana cadangan

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

d) Penerimaan pinjaman

2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup

a) Pembentukan dana cadangan

b) Penyertaan modal desa

c) Pembayaran utang.

#### 2.1.4.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Fungsi APBDes menurut Kusmila (2019) yaitu:

1. Fungsi otorisasi

APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa.

5. Fungsi distribusi

Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.

## 6. Fungsi akuntabilitas

APBDes memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik.

### 2.1.4.5 Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Amiruddin (2017) menjelaskan prinsip APBDes terdiri dari:

#### 1. Transparansi

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

#### 2. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

#### 3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

#### 4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif

Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut kepekaan

pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

5. Professional

Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparaturnya sesuai dengan jabatannya.

#### **2.1.4.6 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 struktur APBDes terdiri atas:

1. Pendapatan desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a) Pendapatan asli desa (PAD):

1. Hasil usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa.
2. Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan asset desa. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.
3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan

sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

## 2. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:

### a) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### b) Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

3. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

**2.1.5 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

**2.1.5.1 Sejarah SISKEUDES**

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Persiapan ini selarasa dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi



yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kusmila, 2019).

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwalian BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance oleh Tim yang telah ditunjuk.

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

### **2.1.5.2 Tujuan SISKEUDES**

SISKEUDES memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, SISKEUDES secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data.

### **2.1.5.3 Kelebihan SISKEUDES**

Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES versi Permendagri 20 Tahun 2018 diantaranya:

- 1) Aplikasi SISKEUDES memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa;
- 2) User friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level Pemerintah Desa;
- 3) Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi;
- 4) Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa (built-in internal control);
- 5) Kesenambungan Maintenance karena merupakan aplikasi resmi Pemerintah;

- 6) Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan SIPEDE milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

#### 2.1.5.4 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem keuangan desa atau SISKEUDES merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. SISKEUDES ini merupakan sistem yang dibuat sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, memudahkan membuat laporan tatakelola keuangan desa dikarenakan sebelum diberlakukannya SISKEUDES ini, pencatatan laporan keuangan desa masih menggunakan *Microsoft Excel* atau dengan mencatat secara manual yang kurang efisien.

SISKEUDES didesain dengan *user friendly* sehingga memudahkan aparat desa untuk menggunakannya yaitu walaupun perangkat desa tersebut belum dibekali dengan ilmu dasar akuntansi tetap bisa menggunakannya dengan melalui pelatihan dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan manual aplikasi, dan menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. SISKEUDES ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah

diterapkan oleh pengguna aplikasi. Secara teknis transaksi-transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala yang kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan menggunakan database acces ini (Hanafi 2019). Dengan diterapkannya sistem keuangan desa ini, diharapkan nantinya agar dapat membantu kinerja para aparat desa agar semakin membaik dan penggunaan dari sistem keuangan desa ini dapat lebih efektif.

Dilansir dari situs resmi BPKP, fitur-fitur yang ada dalam sistem keuangan desa dibuat secara sederhana guna menyikapi kondisi desa yang bervariasi serta memudahkan penerapannya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laoran-laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*) dan didukung dengan petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

SISKEUDES didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota di seluruh desa di seluruh Indonesia. Pelatihan SISKEUDES bagi perangkat desa maupun pembina ditingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. SISKEUDES

memiliki beberapa kelebihan seperti mudah diakses, dapat disesuaikan dengan perkada (peraturan kepala desa) masing-masing, dan memiliki Sistem Pengendalian Internal atau SPI. Pengembangan aplikasi SISKEUDES diharapkan dapat diterapkan diseluruh desa-desa di Indonesia guna untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan (<https://kominfo.go.id>).

#### **2.1.5.5 Dasar Pengembangan**

Dasar pengembangan SISKEUDES menurut Permendagri 20 Tahun 2018 meliputi:

- 1) Tersedianya kesempatan pelatihan dan materi pengelolaan keuangan. Para pejabat kabupaten dan kecamatan memerlukan pelatihan dalam mengelola keuangan desa dan menyediakan dukungan untuk desa jika diperlukan.
- 2) Tutorial video, materi e-learning, kelompok diskusi pengguna di media sosial diperlukan untuk meningkatkan arus pengetahuan antara pemberi dan peserta pelatihan.
- 3) Pelibatan pendamping desa. Pendamping desa telah berperan penting dalam membangun kapasitas desa. Namun para pendamping ini; belum secara konsisten terlibat dalam implementasi SISKEUDES. Kemendagri, BPKP, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dapat mengoordinasikan

keterlibatan para pendamping desa untuk mendukung implementasi SISKEUDES.

- 4) Mewajibkan desa menggunakan SISKEUDES. Semua Bupati dan Wali Kota (yang bertanggung jawab kepada Gubernur) harus mengeluarkan instruksi kepada desa untuk menggunakan SISKEUDES untuk menyiapkan anggaran dan laporan keuangan desa.
- 5) Kajian teknis. Kajian teknis atau audit khusus terhadap SISKEUDES harus dilakukan oleh BPKP dan Kemendagri untuk memastikan aplikasi ini mematuhi aturan, bebas dari bugs, dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- 6) Sertifikasi. Perlu semacam sertifikasi dari sebuah perusahaan independen untuk menjamin kualitas dan keandalannya.
- 7) Integrasi. SISKEUDES harus digunakan sebagai sumber data utama untuk aplikasi-aplikasi lain seperti untuk pencairan Dana Desa (OMSPAN di Kementerian Keuangan), dan untuk Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE di Kemendes).
- 8) Versi web. Diperlukan SISKEUDES versi daring yang melakukan sinkronisasi otomatis antara desa dan kabupaten/kota. Versi ini memerlukan infrastruktur jaringan yang memadai.

### 2.1.5.6 Indikator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menurut Wiguna (2017), indikator SISKEUDES meliputi:

1. Efektivitas dan produktivitas.

SISKEUDES membantu dalam menyelesaikan tugas atau tanggungjawab pemerintah desa secara efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

2. Komunikasi Intenal

SISKEUDES dapat meningkatkan komunikasi antar divisi dalam pemerintahan desa.

3. Pengambilan Keputusan

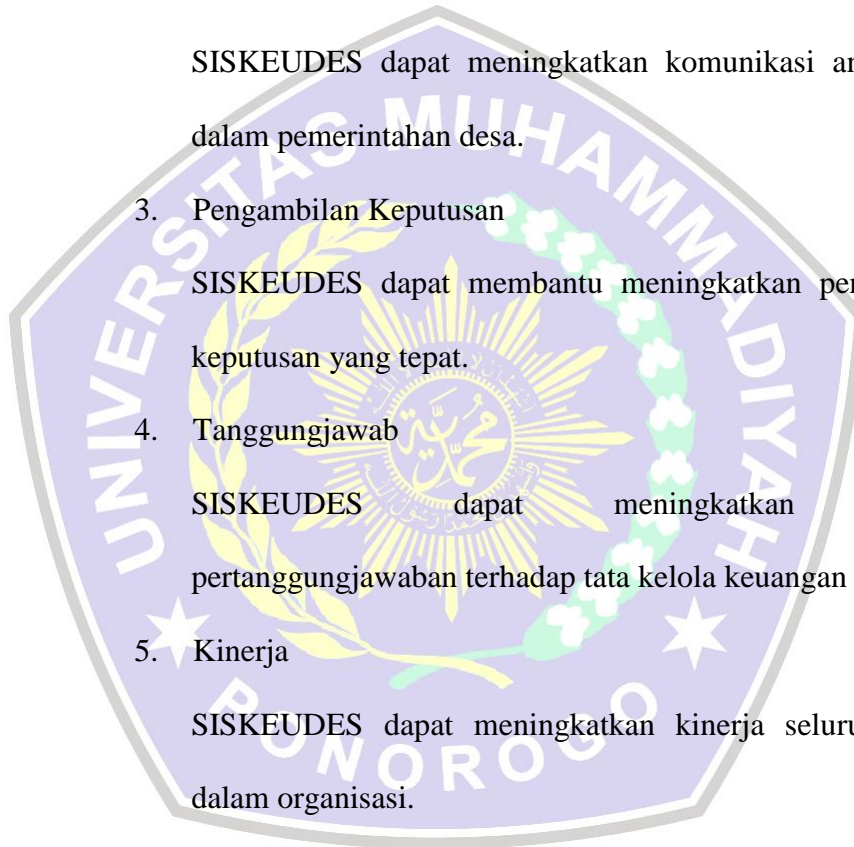
SISKEUDES dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat.

4. Tanggungjawab

SISKEUDES dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban terhadap tata kelola keuangan desa.

5. Kinerja

SISKEUDES dapat meningkatkan kinerja seluruh bagian dalam organisasi.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dengan tema yang sama dapat dijadikan tambahan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini, disajikan dengan tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wiguna, Yuniarta, dan Prayudi (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng)	Metode penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES.</li> <li>2. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES.</li> <li>3. Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES.</li> </ol>
2.	Arizal Pasha (2018)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf	Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</li> </ol>



		Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan)		<p>pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
3.	Priyono (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Brebes	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.	<p>1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Brebes.</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan</p>

				<p>desa di Kabupaten Brebes.</p> <p>3. Kecanggihan teknologi berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Brebes.</p> <p>4. Usia berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Brebes.</p> <p>5. Kompleksitas tugas berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Brebes.</p>
4.	Hanafi (2019)	Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan, Pendampingan Desa, Dan Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penggunaan SISKEUDES Dengan Kualitas Sumber Daya	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.	1 Terdapat enam hipotesis dari variabel yang diterima dari hasil pengujian yang dilakukan, antara lain yaitu pelatihan dan pendidikan, sarana dan

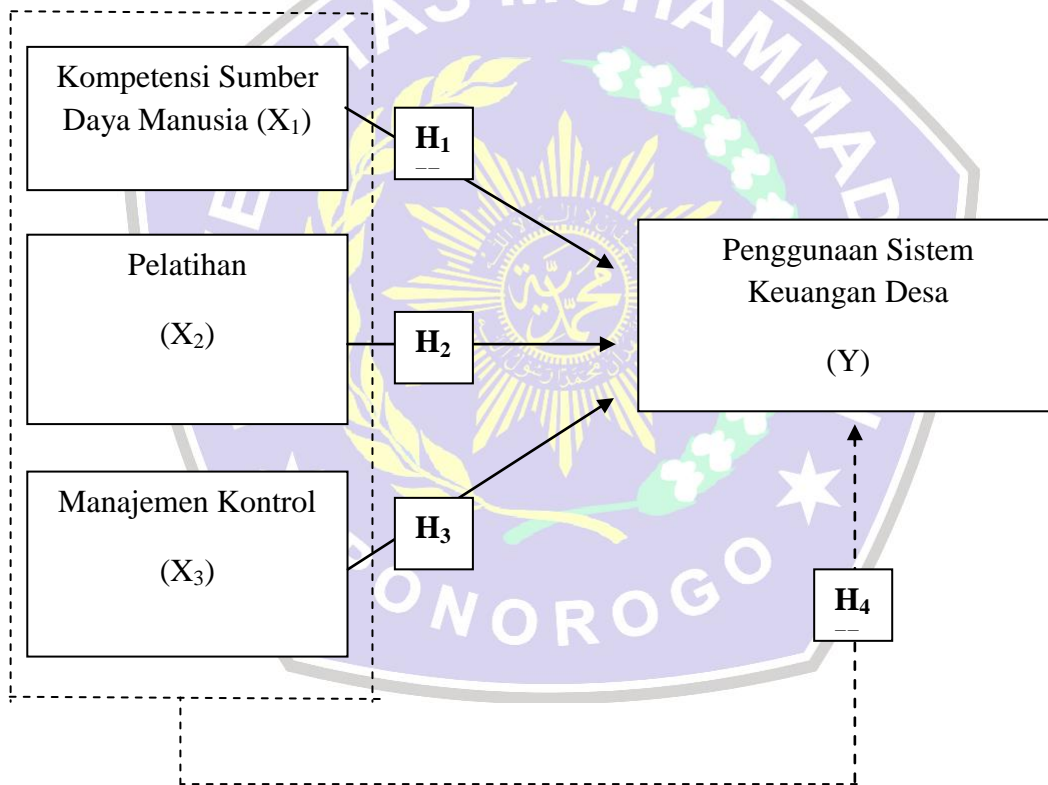
		Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Gunungkidul)		<p>prasarana, dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan</p> <p>2 Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terdapat 2 hipotesis dari 1 variabel yang tidak berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES dan kualitas sumber daya manusia, variabel tersebut adalah pendampingan desa.</p>
5.	Nintyari, Kurniawan, dan Atmaja (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Tabanan)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.	<p>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SISKEUDES.</p> <p>2. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SISKEUDES. Manajemen kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan</p>

				efisiensi pelaksanaan SISKEUDES
--	--	--	--	---------------------------------

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu diolah tahun 2021

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan (Sugiyono, 2017). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Keterangan:

- > : Hubungan Secara Parsial
- - - - -> : Hubungan Secara Simultan

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua hubungan baik secara parsial maupun secara simultan. Secara parsial yaitu apakah

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa, apakah pelatihan berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa, apakah manajemen kontrol berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa. Sedangkan secara simultan yaitu apakah kompetensi sumber daya manusia, pelatihan, dan manajemen kontrol berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa**

Menurut Yendrawati (2013), pengertian kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, maka semakin tinggi pula pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES.

Secara umum, kompetensi sumber daya manusia yang terampil sangat diperlukan dalam penggunaan suatu sistem. Mengingat SISKEUDES adalah sistem informasi akuntansi yang wajib digunakan bagi desa. Hubungan kualitas sumber daya manusia dengan penggunaan SISKEUDES mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dkk, (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Priyono (2018) yang

menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Brebes. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis yaitu:

**Ho<sub>1</sub> :Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa**

**Ha<sub>1</sub> :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa**

#### **2.4.2 Pengaruh Pelatihan Terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa**

Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian proses seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional dibidangnya. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dapat mengajarkan keahlian yang diperlukan baik untuk pekerjaan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang kepada para manajer yang profesional. Semakin baik pelatihan yang dilakukan maka semakin baik pula peningkatan pengelolaan laporan keuangan dengan menggunakan SISKEUDES.

Hubungan pelatihan dengan penggunaan SISKEUDES mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dkk, (2017) menyimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Priyono (2018) yang menunjukkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan tidak

berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Brebes. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis :

**Ho<sub>2</sub> :Pelatihan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa**

**Ha<sub>2</sub> :Pelatihan berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa**

#### **2.4.3 Pengaruh Manajemen Kontrol Terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa**

Menurut H.B Siswanto (2016), pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran perusahaan.

Dalam hal ini, tindakan perbaikan dapat mengendalikan kearah kemajuan organisasi tersebut, dan memungkinkan pimpinan menyadari adanya penyimpangan secara lebih dini sehingga dapat melakukan tindakan koreksi sebelum penyimpangan semakin tidak terkendali. Hal ini berarti semakin baiknya suatu sistem pengendalian internal maka pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES dapat berjalan dengan baik dan terkontrol.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nintyari dkk, (2019) manajemen kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SISKEUDES. Penelitian serupa oleh Arizal (2018) yang menyatakan bahwa manajemen kontrol tidak berpengaruh terhadap penggunaan SISKEUDES. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis :

**H<sub>03</sub> : Manajemen kontrol tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa**

**Ha<sub>3</sub> : Manajemen kontrol berpengaruh terhadap penggunaan sistem keuangan desa**

#### **2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelatihan, dan Manajemen Kontrol Secara Simultan Terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa**

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat atau sistem yang dipergunakan dalam mengelola keuangan desa. Terciptanya penggunaan sistem keuangan desa yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi SDM, pelatihan, dan manajemen control. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyowati (2021), Wiguna dkk, (2017), Ayyasy (2018), Luh Restiti Nintyari dkk (2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>04</sub> : Kompetensi sumber daya manusia, pelatihan, dan manajemen kontrol tidak berpengaruh simultan terhadap penggunaan sistem keuangan desa**



**Ha<sub>4</sub> : Kompetensi sumber daya manusia, pelatihan, dan manajemen kontrol berepengaruh simultan terhadap penggunaa sistem keuangan desa**

